

Tujuan Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Indah Indriani^{1*}, Wiene Surya Putra², Ade Rizki Ananda Sinuraya³
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah¹²³, Binjai, Indonesia
Email: indahiindriani02@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 2, Desember 2023 Halaman :273-277	<i>This research aims to reveal the main purpose behind education policy-making, detailing the important components involved in the process. Education policy plays a crucial role in realizing the vision and mission of education through well-planned strategic steps. The five components of education policy, namely goals, plans, programs, decisions and impacts, are the main focus of this research. This research also explores the characteristics of education policies, which include aspects of educational objectives, compliance with legal-formal aspects, clear operational concepts, making by the authorities, evaluability, and structured systematics. The discussion of approaches to implementing education policy is important, detailing the structural, procedural and managerial, behavioral and political approaches involved in the process. Through an understanding of the objectives of educational policy making and the components that influence it, it is expected to provide in-depth insight into the role and impact of educational policy in directing the activities of educational organizations towards achieving predetermined goals. The conclusion of this research is expected to be a significant contribution to the understanding and development of effective and sustainable education policies.</i>
Keywords: <i>goals, Policy Education</i>	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tujuan utama di balik pembuatan kebijakan pendidikan, dengan merinci komponen-komponen penting yang terlibat dalam proses tersebut. Kebijakan pendidikan memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan melalui langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik. Kelima komponen kebijakan pendidikan, yakni tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengeksplorasi karakteristik kebijakan pendidikan, yang mencakup aspek tujuan pendidikan, kepatuhan terhadap aspek legal-formal, konsep operasional yang jelas, pembuatan oleh pihak berwenang, evaluabilitas, dan sistematika yang terstruktur. Pembahasan tentang pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan menjadi penting, dengan merinci pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, perilaku, serta politik yang terlibat dalam proses tersebut. Melalui pemahaman terhadap tujuan pembuatan kebijakan pendidikan dan komponen-komponen yang mempengaruhinya, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait peran dan dampak kebijakan pendidikan dalam mengarahkan kegiatan organisasi pendidikan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci :tujuan, Kebijakan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi (Kiwang et al, 2014). Lebih lanjut kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum (Nasarudin, 2016).

Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Junaid, 2016). Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan diantaranya yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan (Dewi, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang sistematis yang saling berkaitan antar sub sistem. Sistem tidak akan berjalan apabila salah satu sub sistem bermasalah yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi sub sistem tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Agar dapat memberikan pelayanan yang baik maka penyelenggara pendidikan harus dapat memahami aspirasi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat (Mustaqin, 2016). Pendidikan diharapkan mampu memberikan pelayanan secara nyata kepada masyarakat baik dari tingkat pusat bahkan harus juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada daerah (Purba et al, 2021). Artinya diperlukan upaya untuk menjalin komunikasi dengan stakeholders dalam pendidikan agar penyelenggara pendidikan dapat merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengoptimalkan proses pengelolaan pendidikan. Hal ini lah yang menjadi pandangan baru dalam proses pengelolaan pendidikan bahwa perlunya gagasan yang bersifat desentralisasi agar pengelolaan pendidikan dilakukan secara bersamaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pada pendidikan tidak terlepas dari sebuah kebijakan, karena pendidikan merupakan keseluruhan dari sebuah proses, dan hasil dari perumusan langkah-langkah yang menjadi penjabaran visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di masyarakat.

Pengelolaan pendidikan bukan lah hal yang mudah (Aziz, 2015). Diperlukannya proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat (Muhdi et al, 2017). Penyelenggara pendidikan harus benar-benar paham mengenai hakikat kebijakan pendidikan (Nurhardjadm, 2008). Kebijakan pendidikan yang dilahirkan tidak hanya saja bersifat pada golongan tertentu namun akan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat (Bakry, 2010). Kebijakan pendidikan yang dihasilkan dengan proses yang tepat akan menghasilkan luaran yang akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati dan apabila kebijakan pendidikan yang dihasilkan tanpa adanya proses yang bersifat prosedural maka akan berdampak kepada mutu pendidikan (Winarsih, 2017).

Memahami permasalahan tersebut maka Kebijakan Pendidikan menjadi pijakan dalam memberikan kejelasan dan arah yang harus ditempuh serta dilaksanakan bagi penyelenggara pendidikan, Kebijakan Pendidikan juga menjadi payung hukum bagi seluruh penyelenggara pendidikan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang didapatkan dari tulisan-tulisan para ahli dalam pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang sangat penting untuk memajukan pendidikan. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi keberhasilan kebijakan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan. Subyek yang menjadi sumber utama adalah kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan dalam pendidikan. Hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli dalam pendidikan, dengan membaca buku dan jurnal yang terkait. Buku dan jurnal digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan data-data terkait kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalisa sehingga dapat diambil dijadikan sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang samasama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017). Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka formulasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dapat terjadi secara terus menerus seiring dengan munculnya berbagai problematika yang dihadapi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang ideal tidak dapat lahir dengan sendirinya melainkan harus terlebih dahulu melewati sejumlah tahapan dan proses yang kompleks sebelum akhirnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan diterima. Hal ini sebagaimana yang terjadi di pondok pesantren Hidayatul Muhsinin. Ketika suatu permasalahan terjadi dan belum memiliki regulasi yang tepat, maka ketika itu formulasi kebijakan dilakukan. Permasalahan sebagaimana dimaksud dibagi ke dalam dua bagian, yakni permasalahan internal, seperti: dalam memberikan keputusan terhadap besaran kenaikan uang iuran ekoloh/madrasah atau "uang daftar ulang",

Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Dari banyaknya pemahaman tentang kebijakan dari pakar dan tokoh manajemen di atas, dapat ditarik benang merah kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan bersifat problem solving dan proaktif, berbeda

dengan hukum (law) dan peraturan (regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tidak menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Asumsi tentang kebijakan mempunyai status khusus dalam model rasional sebagai unsur yang secara relatif bertahan dalam uji konsistensinya. Dengan demikian, kita bisa berbicara tentang kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, atau kebijakan pemasaran, kebijakan pendidikan, dimana seolah-olah istilah itu menunjukkan kebijakan lokal dari suatu tema universal, cara manipulasi lingkungan eksternal dari organisasi, dan menggunakan tindakan bertujuan tertentu.

Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu; 1) Goal (Tujuan). Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak; 2) Plans (Rencana). Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas; 3) Programme (Program). Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan; 4) Decision (Keputusan). Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak; 5) Effects (Dampak). Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupan dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturanaturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang

organisasi.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Karakteristik kebijakan pendidikan yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi dan memiliki sistematika. Pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan terdiri dari pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan perilaku dan pendekatan politik.

Bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

REFERENCES

- Arwidayanto, dkk. (2018). Analisis kebijakan pendidikan kajian teoritis dan eksploratif dan aplikasi, Bandung: CV . Cendekia press.
- Alwijaya, Fadyah, dkk. (2021) konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* . Vol. 6 No. 1. h. 67-71.
- Solichin, Mujianto. (2015) Implementasi kebijakan Pendidikan Dan Peran birokrasi. Universitas pesantren tinggi darul ulum Jombang- Indonesia. Volume 6, nomor 2. H 148-178
- Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal medtek*. Vol. 2 No 1. Aziz, Asep Abdul, dkk. 2020.
- Model analisis kebijakan pendidikan. *Tapis: jurnal penelitian ilmiah*. Vol. 4 No. 2 h. 192-201
- Oktavia, Linda Sari, dkk. 2021. Kebijakan pendidikan: kerangka, pvdts dan strategi. *JRTI (jurnal riset tindakan Indonesia)* . Vol. 6 No 1. h. 95-99
- Rozak, Abdul. 2021. Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal of islamic education*. Vol 3 No. 2, h. 197-208
- Yuliah, Elih. 2020, Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal at-fadbir*. Media hukum dan pendidikan. Vol. 30 No, 2 h. 129-153
- Rizqiyah, Ainur. 2023. Perumusan kebijakan pendidikan islam.taklimuna: *Jurnal of education and teacing*. Vol. 2 No . 2. h. 1-10
- Marsari, Henni, dkk. 2021. Model perumusan kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset tindakan indonesia)* . Vol. 6. No. 1. h. 89-94.
- Nugraha, M. Tisna, dkk. 2021. Formulasi kebijakan pendidikan di pondok pesantren Hidayatul Muslihin kubu raya. *Jurnal pendidikan dan konseling*. Vol. 3. No. 1
- Nurharjadmo, Wahyu. 2008. Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan sistem Banda di sekolah kejuruan, FSIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, VOL. 4. NO. 2. h. 215-228.
- Pawero, Abdul Muis daeng- 2021. Arah Bani perencanaan pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan. *Jurnal dirarah*. Vol. 4. No. 1. h. 16-32